

Pelaksanaan Pendidikan Agama di Sekolah Umum

H. Moh. Kasiram

Abstract: Religious Education, as a component of National Education System, has an important role for developing Indonesian citizens who have *iman* (belief) and *taqwa* (faith) to One God. That is why UUSPN 1989 and GBHN 1993 put Religious Education in the curriculum as a compulsory subject in schools. This research has identified what strategies and efforts have been taken by religious teachers for undertaking religious instruction in schools and identified what factors have stimulated or disturbed the application of religious instructions. The results indicate that religious teachers have tried to apply religious instruction as a basis for developing Indonesian citizens. The researcher recommended that the findings be used to increase religious instruction in all schools and in designing further research.

Kata-kata kunci: Pendidikan Agama Islam, kurikulum, Rancangan Satuan Pelajaran, proses belajar mengajar.

Betapa pentingnya kedudukan pendidikan agama dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dapat dibuktikan dengan ditempatkannya unsur agama dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila pertama dalam Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, yang memberikan makna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama. Untuk membina bangsa yang beragama, pendidikan agama ditempatkan pada posisi strategis dan tidak dapat dipisahkan dalam sistem pendidikan nasional.

H. Moh. Kasiram adalah Lektor Kepala di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang.

Keterkaitan antara agama dan sistem pendidikan nasional jelas disebutkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional, baik dalam UUSPN No 2 tahun 1989 maupun dalam GBHN 1993. Dalam UUSPN pasal 4 disebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Sedangkan dalam GBHN 1993 bidang pendidikan disebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, tanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani.

Kedua rumusan tujuan pendidikan nasional itu diawali dengan sebutan manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Unsur beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini dijadikan azas pertama dari azas-azas pembangunan nasional oleh GBHN. Dengan azas beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dimaksudkan bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional dijiwai, digerakkan, dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral dan etik dalam rangka pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila (GBHN Bab II C.1). Selanjutnya GBHN memerintahkan agar diupayakan terus bertambah sarana yang diperlukan bagi pengembangan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, termasuk sarana pendidikan agama pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan termasuk pra-sekolah, yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan cita-cita ini, maka UUSPN No 2 Tahun 1989 dan GBHN 1993 mewajibkan pendidikan agama dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Pasal 39 UUSPN ayat 2 menyebutkan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan. Hal yang senada juga disebutkan dalam GBHN Bab IV bidang pendidikan bahwa kurikulum dan isi pendidikan yang memuat pendidikan Pancasila,

pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan terus ditingkatkan dan dikembangkan di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan nasional.

Dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 UUSPN disebutkan bahwa pendidikan agama merupakan usaha untuk memperkuat iman dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut peserta didik yang bersangkutan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.

Keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat berfungsi sebagai pengendali tingkah laku manusia. Dengan kokohnya iman dan taqwa, manusia terhindar dari berbagai godaan nafsu pribadi yang negatif dan terdorong untuk berbuat kebaikan dan amal shaleh. Dengan demikian orang yang beriman dan bertaqwa akan selalu dituntun oleh petunjuk Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dia dapat membedakan yang baik dan yang kurang baik, kemudian bersikap tegas untuk memilih yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan (Kasiram, 1993:4-5). Dengan demikian dia tidak mudah terombang-ambing oleh pengaruh globalisasi yang makin mencekam.

Arus globalisasi ternyata semakin kompleks dan semakin intensif pengaruhnya dalam kehidupan manusia. Ini merupakan akibat dari perkembangan media massa yang menyebarkan informasi nilai budaya dengan cepat sehingga nilai budaya tidak lagi bersifat lokal melainkan bersifat nasional dan internasional. Hal ini akan meningkatkan heterogenitas nilai budaya dalam masyarakat sehingga nilai agama yang semula menjadi satu-satunya sumber kebenaran kini menjadi kabur atau luntur. Kondisi ini akan sangat rawan bagi peserta didik yang sedang berkembang, termasuk yang sedang belajar di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Keadaan ini merupakan tantangan bagi pendidikan agama. Pendidikan agama harus secara fungsional dapat menjawab berbagai persoalan yang dihadapi oleh peserta didik di era globalisasi ini.

Untuk menghadapi tantangan ini, pendidik agama harus mampu mencari model penyampaian pendidikan agama yang baru, yang dapat memotivasi anak didik aktif menjawab persoalan-persoalan kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena itu model pengajaran yang bersifat indoktrinatif, dogmatis dan normatif tidak cocok lagi digunakan. Pendidikan agama harus disampaikan secara empirik problematis sehingga anak didik secara aktif dapat mengintegrasikan ajaran-ajaran agama dengan masalah

sosial yang dihadapinya. Hal ini penting dalam pembentukan sikap sosial anak. Anak dilatih untuk menggunakan persepsi agama terhadap realitas kehidupan. Guru agama harus selalu berusaha mengajak anak didik untuk melakukan refleksi teologis dalam menghadapi setiap bentuk tantangan hidup. Dengan demikian anak didik tidak mengalami hampa iman dan taqwa sehingga dapat terhindar dari rasa tergantung pada orang lain (guru agama atau kyai) secara berlebihan. Secara perlahan akan terjadi internalisasi norma-norma agama ke dalam diri anak didik sehingga anak melakukan setiap kegiatan tidak lagi karena takut pada guru atau orang lain melainkan karena terpanggil oleh iman dan taqwanya terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Gerungan, 1987:99—100).

Di samping disampaikan secara empirik problematis, pendidikan agama juga disampaikan dengan pola homeostatika, yaitu keselarasan antara akal kecerdasan dan perasaan yang melahirkan perilaku akhlakul karimah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pola ini menuntut upaya lebih menekankan faktor kemampuan berpikir dan berperasaan moralis yang merentang ke arah Tuhannya dan ke arah masyarakatnya, yang menempatkan iman dan taqwa menjadi rujukannya (Arifin, 1991).

Model penyampaian pendidikan agama seperti itu menuntut para pendidik agama, baik di keluarga, di sekolah, maupun di masyarakat, untuk bertindak secara sistematis, terprogram dan profesional. Tuntutan ini semakin kuat tertuju kepada para guru agama di sekolah, karena pendidikan agama di sekolah dianggap yang paling penting sehingga daya upaya peningkatan pendidikan agama biasanya difokuskan pada pendidikan formal (Subiyanto, 1994).

Kurikulum pendidikan agama di sekolah, sebagaimana bidang studi yang lain, telah disusun dengan baik secara nasional dengan mengikuti sistem pengajaran PPSI. Rincian kurikulum Pendidikan Agama Islam tertuang dalam GBPP PAI berdasarkan keputusan Dirjen Dikdasmen 1993/1994 (SD), Depdikbud 1993 (SLTP), dan Depdikbud 1995 (SMU). Menurut GBPP PAI itu, fungsi Pendidikan Agama Islam adalah sebagai pengembangan, penyaluran, perbaikan, pencegahan, penyesuaian, sumber nilai dan pengajaran. Sedangkan pendekatan yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran agama pada siswa ialah pendekatan pengalaman, pendekatan pembiasaan, pendekatan emosional, pendekatan rasional dan pendekatan fungsional (Dirjen Dikdasmen, 1993/1994; Depdikbud, 1993; Depdikbud, 1995).

Menurut Mochtar Buchari (dalam Muhaimin, 1991:10), praktik pendidikan agama di Indonesia ada 4 macam, yaitu pendidikan agama yang dilaksanakan secara tradisional di Pondok Pesantren, pendidikan agama yang dilaksanakan di madrasah, pendidikan agama yang dilaksanakan di lembaga-lembaga pendidikan Islam yang bersifat umum, dan pendidikan agama Islam yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan umum sebagai suatu mata pelajaran, bidang studi atau mata kuliah saja.

Pendidikan agama yang dilaksanakan di sekolah umum (yang menjadi pusat kajian dalam penelitian ini) adalah pendidikan agama sebagai bidang studi sehingga juga mengikuti sistem pengajaran seperti bidang studi lain. Kurikulum pendidikan agama telah disusun dalam format terinci sebagaimana terlihat dalam GBPP PAI sesuai dengan jenjang pendidikan yang bersangkutan. GBPP tersebut memuat antara lain pengertian, tujuan, ruang lingkup materi, fungsi, pendekatan, metode, media dan evaluasi. Guru agama dituntut untuk benar-benar mampu menerjemahkan isi kurikulum sebagai cerminan cita-cita ideal dalam pelaksanaan pendidikan agama di Indonesia. Kemampuan ini mencakup kemampuan merancang pembelajaran, yakni membuat satuan pelajaran (Satpel), dan kemampuan PB yakni kemampuan menyampaikan pelajaran di kelas. Oleh karena pendidikan agama harus menyentuh aspek kognitif, afektif dan psikomotorik secara seimbang, maka kegiatan intrakurikuler harus dilengkapi dengan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Namun umumnya bobot evaluasi yang paling tinggi diletakkan pada intrakurikuler, sedang kokurikuler dan ekstrakurikuler digunakan sebagai pelengkap. Guru dituntut untuk merancang semuanya itu dengan baik. Mengidentifikasi kemampuan-kemampuan guru agama dalam merekayasa pelaksanaan pendidikan agama inilah yang menjadi tekanan dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dipermasalahkan dalam penelitian ini bukan isi kurikulum pendidikan agama, melainkan bagaimana kurikulum itu dilaksanakan oleh guru agama di sekolah-sekolah umum di Kodya Malang. Rumusan masalahnya adalah bagaimana strategi dan upaya guru agama dalam melaksanakan pendidikan agama di sekolah, dan bagaimana kondisi kontekstual yang memberikan kekuatan sebagai pendorong atau penghambat pelaksanaan pendidikan agama di sekolah. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan agama di sekolah, dan mengidentifikasi kondisi kontekstual yang memberikan kekuatan sebagai pendorong atau penghambat pelaksanaan pendidikan agama di sekolah.

METODE

Sebagai penuntun penelitian ini, perlu diajukan sebuah paradigma yang digunakan dalam penelitian ini. Paradigma diartikan sebagai kumpulan longgar tentang asumsi yang secara logis dianut bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan cara penelitian (Moleong, 1993:8). Paradigma penelitian diperlukan untuk menentukan cara dan arah pelaksanaan penelitian sehingga terdapat konsistensi pemikiran, pembahasan dan pelaporannya. Ritzer (dalam Dimiyati, 1991) membuat bagan tentang tingkat-tingkat utama mengenai realitas sosial. Ada 4 kuadran yaitu kuadran makroskopik objektif dan subjektif dan kuadran mikroskopik objektif dan subjektif. Kedudukan pelaksanaan pendidikan Agama Islam dalam hal ini berada pada kuadran ketiga yaitu kuadran mikroskopik objektif.

Melihat posisi pelaksanaan pendidikan Agama di sekolah terletak pada kuadran ke-3, yakni kuadran mikroskopik objektif, maka rancangan penelitian yang tepat ialah rancangan deskriptif kuantitatif. Namun dalam menganalisis data, di samping digunakan analisis kuantitatif, tidak tertutup kemungkinan digunakan analisis deskriptif kualitatif apabila data yang diperoleh berupa data kualitatif, sehingga keduanya dapat saling melengkapi.

Populasi penelitian adalah seluruh sekolah umum di Kodya Malang, baik yang berstatus negeri maupun swasta. Penelitian ini akan menggunakan sampel yang ditarik secara purposif. Dasar pikirannya ialah, bahwa: (1) sekolah-sekolah umum di Kodya Malang memiliki prestasi yang cukup mengembirakan, dari hasil pembinaan yang terus menerus, (2) di seluruh sekolah umum diberlakukan kurikulum dan sistem PBM yang sama, yakni kurikulum nasional dan PBMnya menggunakan Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional, PPSI, (3) kodya Malang sebagai kota pendidikan cukup memberi motivasi tiap lembaga pendidikan untuk selalu berbenah diri, dan (4) status negeri swasta tidak lagi menggambarkan kelas satu dan kelas dua, yang merupakan mitra yang berkedudukan sama. Dengan pertimbangan ini, maka kondisi sekolah umum di Kodya Malang boleh dikatakan relatif homogen sehingga dalam pengambilan sampel tidak menjadi masalah metodologis (Hadi, 1980:74). Atas dasar pertimbangan ini, maka ditunjuk sampel sebanyak 6 sekolah umum negeri dan swasta dengan rincian 4 unit sekolah jenjang pendidikan dasar dan 2 unit sekolah jenjang pendidikan menengah. Enam unit sekolah tersebut

ialah: SDN 3, SMPN 8, SMPN 9, SMP Muhammadiyah 17, SMU 4, dan SMU 7. Adapun responden penelitian ini adalah semua kepala sekolah, semua guru agama dan murid yang seluruhnya berjumlah 436 orang, terdiri dari 6 kepala sekolah, 34 guru agama dan 396 murid SD, SMP dan SMU. Untuk menunjuk sampel murid dan guru yang diobservasi kemampuannya dalam melaksanakan proses belajar mengajar (PBM) di kelas, digunakan teknik aksidental, yakni mengambil kelas yang pada saat observasi dilakukan sedang diajar oleh guru agama.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah: observasi, khusus digunakan untuk mengamati proses belajar mengajar guru agama di kelas dan sarana/alat pendidikan agama; wawancara, digunakan untuk mengungkapkan keterlibatan kepala sekolah, guru umum dan guru agama dalam kegiatan agama di sekolah; angket, diberikan kepada guru agama dan murid untuk mengungkap data PBM dan upaya guru agama dalam melaksanakan pendidikan agama dan tanggapan murid terhadap pendidikan agama; dan dokumenter, digunakan untuk menilai kemampuan guru dalam menyusun Satuan Pelajaran (Satpel) Pendidikan Agama Islam.

Data tentang kemampuan guru agama Islam dalam merancang Satpel diperoleh dengan memeriksa Satpel yang dipakai oleh guru agama yang sedang mengajar. Dari 11 guru yang ditemui, ternyata satu orang guru tidak membuat Satpel. Teknik penilaian kemampuan guru di bidang ini diadaptasi dari *Alat Penilaian Kemampuan Guru Menyusun Rencana Pengajaran* karya Tim IKIP MALANG (Baharuddin Harahap, Mustafa Kamal, Wahyudi, Djuitaningsih dan Ny. M. Rosyidan). Komponen yang dinilai meliputi rumusan TIK, pengorganisasian bahan pengajaran, pengelolaan kegiatan belajar mengajar, alat/sarana, sumber pengajaran dan penilaian prestasi siswa. Masing-masing komponen ditentukan indikatornya dan penilaiannya menggunakan skala deskriptor dari masing-masing indikator. Masing-masing indikator diberi skor menurut skala deskriptor yaitu skala lima, dari yang tidak sesuai (skor 1) sampai yang paling cocok (skor 5) dengan yang dikehendaki kurikulum. Dengan teknik skoring ini masing-masing guru memperoleh skor minimal 16 dan maksimal 90. Dari skor ini dapat ditentukan nilai kemampuan guru, kualitas prestasi guru, dan tingkat prestasi sekolahnya.

Data kemampuan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar pendidikan agama di kelas diperoleh melalui observasi sewaktu guru yang bersangkutan mengajar di kelas. Guru yang diobservasi sebanyak 11 orang guru agama. Ada 7 komponen yang dinilai dengan 24 indikator,

yang masing-masing indikator dinilai dengan deskriptor yang menggunakan skala lima, yaitu dari pelaksanaan mengajar yang tidak sesuai sampai yang paling sesuai dengan Satpel. Ketujuh komponen dimaksud adalah: penggunaan metode, media, dan bahan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran; berkomunikasi dengan siswa; mendemonstrasikan khasanah metode mengajar; mendorong dan melibatkan siswa dalam pengajaran; mendemonstrasikan penguasaan mata pelajaran dan relevansinya; mengorganisasikan waktu, ruang, bahan dan perlengkapan pengajaran; dan mengadakan evaluasi pencapaian siswa dalam proses belajar mengajar.

Dengan teknik skoring pada setiap indikator dengan menggunakan deskriptor skala lima, maka masing-masing guru memiliki skor berkisar antara minimal 24 dan maksimal 120. Dari skor masing-masing guru ini, dapat ditentukan kualitas prestasi guru dan peringkat prestasi sekolahnya. Data yang telah dikumpulkan dianalisis sesuai dengan bentuk data. Data kuantitatif dianalisis dengan mencari persentase data, sedang untuk data kualitatif digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yakni dengan pemikiran reflektif (*reflective thinking*).

HASIL

Hal-hal yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi kondisi guru agama Islam, kondisi dan sarana/prasarana sekolah, kegiatan keagamaan di sekolah, kemampuan guru agama dalam menyusun Satpel, kemampuan guru agama dalam melaksanakan Satpel (PBM) di kelas dan faktor penunjang dan penghambat pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di sekolah.

Berdasarkan hasil analisis data, dapat dikemukakan bahwa seperdua (50%) guru agama Islam telah berijazah sarjana (S1), yang berijazah sarjana muda atau diploma ada 32,35%, dan sebagian kecil saja yang masih berijazah PGA (17,65%). Sebagian besar (76%) dari mereka berpengalaman mengajar kurang dari 10 tahun dan sebagian kecil saja yang berpengalaman mengajar di atas 10 tahun (24%). Sebagian besar (76%) guru agama hanya mengajar di sekolah tempat dia ditugaskan dan hanya sedikit (24%) yang juga mengajar di sekolah lain dengan alasan menambah penghasilan dan alasan lain. Alasan mengapa mereka tidak mengajar di tempat lain adalah bahwa penghasilan yang didapat sudah mencukupi kebutuhan pokok mereka. Dalam melaksanakan tugas mengajar, sebagian besar guru agama Islam sudah menepati disiplin waktu dalam mengajar. Hanya sebagian kecil guru agama (20,59%) yang sering dan kadang-kadang

terlambat datang, dengan alasan jalanan macet karena mereka harus naik mikrolet.

Mengenai kondisi sarana/prasarana sekolah, ada tiga hal yang perlu diungkapkan yakni, kewajiban guru agama datang ke sekolah meskipun tidak mengajar, tersedia tidaknya sarana ibadah di sekolah dan kegiatan keagamaan di sekolah. Dari data yang terkumpul diketemukan bahwa sebagian besar sekolah mewajibkan guru agama datang ke sekolah setiap hari, meskipun mereka tidak mengajar pada hari itu (73,53%) dan hanya 26,47% yang sekolahnya tidak mewajibkan guru agama datang setiap hari.

Sarana ibadah yang dimiliki oleh sekolah telah digunakan untuk kegiatan keagamaan secara terprogram dan untuk shalat lima waktu. Hasil wawancara dan observasi di lapangan menunjukkan bahwa guru agama telah mewajibkan murid untuk shalat wajib secara berjamaah yaitu shalat dhuhur. Karena daya tampung tempat ibadah di sekolah relatif kecil, maka pelaksanaannya diatur secara bergilir perkelas. Perlu dijelaskan bahwa pada umumnya tempat ibadah di sekolah (mushalla) berada di belakang sehingga masyarakat sekitar tidak dapat ikut memakmurkan mushalla tersebut. Semua guru agama Islam telah mewajibkan murid-murid untuk selalu mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah seperti PHBI dan pesantren kilat. Siswa yang tidak mengikuti kegiatan diberi sanksi, antara lain harus mengerjakan tugas-tugas khusus, pengurangan nilai, tugas membuat makalah, menyalin ayat-ayat Al Qur'an yang ditentukan guru, membersihkan kelas atau tempat ibadah, memanggil orang tuanya untuk diberi penjelasan tentang anaknya, dan diberi peringatan secara lisan atau tertulis.

Para guru agama berpendapat bahwa tujuan pendidikan agama adalah: membentuk manusia beriman dan bertaqwa; membentuk manusia yang cerdas, terampil, dan religius; membentuk manusia yang intelek; dan membentuk manusia yang berakhlak mulia. Untuk mencapai tujuan itu, semua guru agama telah berusaha mengajarkan pendidikan agama dengan menekankan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang dan terintegrasi. Ternyata sebagian besar guru agama (79,82%) telah menekankan ranah (*domain*) afektif dalam proses pembelajaran pendidikan agama. Hal ini dipandang tepat, karena dalam hidup beragama sikap dan penghayatan beragama adalah sangat penting melebihi pemahaman dan keterampilan melaksanakan. Untuk memperkaya wawasan anak didik,

sebagian besar guru agama (70,58%) mengaku sering memberi pelajaran penunjang yang tidak tercantum dalam kurikulum.

Metode yang digunakan ialah metode ceramah, tanya jawab, metode *drill*, demonstrasi dan kerja kelompok. Sedangkan media yang digunakan ialah media yang ada dan tidak terprogram. Ukuran keberhasilan pendidikan agama, sebagian besar guru agama menyebut perubahan tingkah laku murid. Berpedoman pada ukuran keberhasilan itu, sebagian besar guru (55,88%) mengatakan bahwa pendidikan agama yang dilaksanakan cukup berhasil. Hal ini ditunjang oleh pernyataan murid, yang menyatakan bahwa 60,88% dari mereka aktif menjalankan shalat lima waktu, 37,12% murid menyatakan kadang-kadang shalat dan hanya sebagian kecil (2,02%) murid yang menyatakan tidak shalat. Keaktifan shalat dari murid ini tampaknya sesuai dengan kondisi orang tua mereka. Sebanyak 78,03% orang tua murid menjalankan shalat secara aktif, 20,20% menyatakan kadang-kadang, dan yang tidak shalat hanya 1,17%.

Berdasarkan analisis skor kemampuan guru, ternyata sebagian besar guru (80%) mencapai prestasi sangat baik, dan sisanya (20%) mencapai kualitas prestasi baik. Peringkat prestasi sekolah adalah peringkat I SMU 4 dan SMU 7 (skor $z = 0,67$), peringkat II SMP 9 (skor $z = 0,43$), peringkat III SMP Muhammadiyah 17 (skor $z = 0,19$), dan peringkat IV SMP 8 (skor $z = -1,97$).

Sebagian besar guru agama Islam yang mengajar di sekolah umum (72,73%) telah berhasil mencapai kualitas prestasi sangat baik dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas, dan 27,27% sisanya berkualitas prestasi baik. Peringkat prestasi sekolah berturut-turut adalah peringkat I SMU 4 (skor $z = 1,03$), peringkat II SMP 7 dan SMP Muhammadiyah 17 (skor $z = 0,36$), peringkat III SMP 8 dan SMP 9 (skor $z = 0,19$), dan peringkat IV SD 3 (skor $z = -2,14$).

Tentang keterlibatan guru bidang studi lain dalam pembelajaran pendidikan agama, dari data yang terkumpul diketahui bahwa dalam melaksanakan kegiatan keagamaan guru agama telah melibatkan guru bidang studi lain, seperti guru ekonomi, fisika, kimia, biologi, dan sejarah untuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan di sekolah. Bentuk kerjasama antara guru agama dan guru umum adalah: (a) memberikan masukan untuk menanamkan materi pelajaran agama ke dalam materi pelajaran umum seperti IPS, Fisika dan Biologi; (b) mengawasi tingkah laku siswa dalam kehidupan sehari-hari di sekolah; (c) mengadakan peringatan hari besar Islam (PHBI); (d) mengadakan Pesantren Kilat; (e) mengadakan

Pondok Ramadhan; (f) kegiatan shalat berjamaah; (g) pelibatan guru bidang studi umum dalam kegiatan khutbah Jum'at dan ceramah agama; (h) menangani zakat fitrah di sekolah; (i) menjadikan imam dalam shalat jamaah. Keterlibatan guru bidang studi umum dalam kegiatan agama di sekolah ternyata menimbulkan rasa kagum siswa dan keinginan untuk meneladani pengamalan agama guru umum itu.

Faktor penunjang yang menonjol adalah bergairahnya siswa dalam menerima pendidikan agama, adanya berbagai kegiatan keagamaan di sekolah, dan dukungan dari Kepala Sekolah. Bentuk-bentuk kegiatan yang menunjang pendidikan agama di sekolah ialah peringatan hari besar Islam, Badan Dakwah Islam, pesantren kilat, Latihan Kader Dasar Muslim (LKDM), shalat berjamaah, pembelajaran Al-Qur'an dan kajian Islam, pengajian rutin, pondok Ramadhan, penambahan jam pelajaran, praktik khitabah, dan bakti sosial ke panti asuhan. Bentuk-bentuk dukungan Kepala Sekolah ialah selalu memberikan motivasi terhadap semua kegiatan keagamaan, selalu mendampingi setiap ada kegiatan keagamaan, menyediakan fasilitas pendukung, dan memberi dukungan dana kegiatan.

Faktor penghambat meliputi: (a) dana yang terbatas sehingga tidak dapat mengembangkan kegiatan-kegiatan agama yang lebih kreatif; (b) sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga sering sekedar memanfaatkan apa yang ada; (c) keadaan siswa yang heterogen; (d) adanya sebagian siswa yang kurang bersemangat dalam belajar agama, yang dapat mempengaruhi siswa lain; (e) kurang mendukungnya lingkungan masyarakat; (f) informasi budaya luar yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, yang nampak dari media elektronik; dan (g) adanya sebagian kecil siswa yang berekonomi lemah dan orang tuanya kurang aktif dalam hidup beragama.

PEMBAHASAN

Guru agama, sebagai guru bidang studi, sebenarnya terikat kepada kurikulum dan GBPP PAI yang diberlakukan secara nasional. Mengingat begitu pentingnya fungsi agama dalam kehidupan manusia, sulit kiranya pendidikan agama tersebut hanya diajarkan dengan alokasi dua jam seminggu. Sedikitnya jam pelajaran agama ini pernah digunakan oleh para guru agama untuk menutupi kelemahan dan kurang berhasilnya pendidikan agama pada anak-anak. Menyadari alokasi waktu yang sulit diubah, diupayakan berbagai cara untuk memfungsikan pendidikan agama sebagai-

mana yang diharapkan oleh undang-undang ataupun GBHN, baik melalui peningkatan kualitas guru agama, penataran, MGBS, dan supervisi. Temuan penelitian ini menunjukkan hasil upaya tersebut.

Ada lima temuan yang menarik untuk didiskusikan. Pertama, kemampuan guru agama dalam mengelola pendidikan agama di kelas baik dalam membuat Satpel maupun dalam PBM di kelas sangat baik. Di samping itu guru memilih pendekatan yang cukup tepat sebagai pengganti pendekatan indoktrinatif, dogmatis dan normatif. Pendekatan baru itu ialah pendekatan empirik problematis dan pendekatan pengalaman dan pembiasaan. Dalam hal ini guru agama berupaya untuk mengajak langsung anak didiknya mengalami, menghayati, dan melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua, pemilihan sasaran dan metode pengajaran yang tepat. Sebagai bidang studi, materi pelajaran agama telah ditetapkan dalam GBPP PAI dan harus diajarkan sesuai dengan alokasi waktu tertentu. Guru agama harus berpikir keras untuk menghabiskan materi GBPP. Untuk ini, pada umumnya metode ceramah menjadi pilihan. Sasaran garapan yang pokok ialah aspek kognitif. Ternyata guru-guru yang diteliti memiliki strategi yang lain, yakni bukan aspek kognitif atau psikomotorik yang diutamakan, melainkan aspek afektif. Guru agama telah menyadari bahwa pendidikan agama harus dapat menjadi kendali tingkah laku dan membentuk sikap agamis pada diri siswanya. Oleh karena itu guru agama telah memilih, selain metode ceramah, juga metode tanya jawab, kerja kelompok, *drill*, dan demonstrasi.

Ketiga, guru agama tidak begitu terikat kepada GBPP PAI. Keterikatan yang kaku terhadap GBPP sering juga dijadikan alat untuk menuduh merosotnya mutu pendidikan. Guru begitu dikungkung dan dituntut untuk menghabiskan materi GBPP tepat pada waktunya. Akibatnya guru tidak sempat belajar dan memperluas wawasan keilmuannya. Kecenderungan yang muncul dalam diri guru ialah semangat menghabiskan materi GBPP tanpa peduli apakah anak didik dapat menerima dengan baik atau tidak. Dengan penuh kesadaran bahwa waktu tatap muka di muka kelas sangat terbatas, guru agama berupaya sekuat tenaga untuk mengadakan berbagai kegiatan dengan mengintensifkan pelaksanaan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler pendidikan agama. Berbagai kegiatan keagamaan telah berhasil dilaksanakan di sekolah, seperti shalat jamaah, shalat Jum'at, ceramah agama, PHBI, pesantren kilat, dan pondok ramadhan.

Keempat, nampak keterlibatan guru umum dalam kegiatan keagamaan di sekolah. Peranan guru agama cukup besar dalam mengajak guru umum untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan keagamaan. Keterlibatan guru umum ini akan sangat membantu menciptakan situasi kehidupan beragama di sekolah. Ternyata guru umum tidak hanya membantu, tetapi bahkan dapat tampil sebagai imam shalat, pemberi khotbah, penceramah agama dan terutama bersedia ikut mengawasi tingkah laku murid sehari-hari di sekolah.

Kelima, nampak dukungan kepala sekolah dalam kegiatan keagamaan di sekolah. Kepala sekolah sangat besar peranannya dalam membina situasi keagamaan di sekolah. Ini pun tidak lepas dari upaya guru agama dalam menjalin hubungan dan kerjasama dengan kepala sekolah. Guru agama yang diteliti cukup berhasil dalam usaha ini, terbukti semua kepala sekolah membantu sepenuhnya upaya guru agama dalam melaksanakan pendidikan agama di sekolah, baik dengan selalu memotivasi perlunya kegiatan agama, menyediakan sarana/alat maupun mengusahakan dana kegiatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Guru agama telah berusaha melaksanakan pendidikan agama dengan sekuat tenaga menjadikan pendidikan agama berfungsi untuk menjadi dasar pembentukan manusia Indonesia seutuhnya dengan jalan memperbaharui pendekatan dalam PBM, menekankan aspek afektif, melibatkan guru umum dalam kegiatan keagamaan, serta menjalin kerjasama dengan kepala sekolah untuk memperoleh dukungan dan penyediaan fasilitas dan dana. Di samping itu guru telah berusaha untuk meningkatkan kualitas dirinya sehingga mencapai kualitas sangat baik, baik dalam merancang Satpel maupun dalam melaksanakan satpel pendidikan agama. Namun keterbatasan sarana, prasarana dan dana masih menjadi penghambat utamanya.

Saran

Disarankan agar hasil-hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelaksanaan pendidikan agama di seluruh sekolah di Kodya Malang. Penelitian lanjutan juga diperlukan untuk mengungkapkan pelak-

sanaan pendidikan agama dalam lingkup masalah dan cakupan wilayah yang lebih luas.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, M. 1991. *Kapita Selekta Pendidikan: Islam dan Umum*. Jakarta: Bumi Aksara
- Depdikbud. 1993. *Kurikulum Pendidikan Dasar, Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Depdikbud.
- Depdikbud. 1995. *Kurikulum Sekolah Menengah Umum, Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP), Mata Pelajaran Agama Islam kelas I, II, dan III*. Jakarta: Depdikbud.
- Dimiyati, M. 1991. *Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Malang: FIP IKIP MALANG.
- Dirjen Dikdasmen. 1993/1994. *Kurikulum Pendidikan Dasar, Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP) Sekolah Dasar (SD), Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen Depdikbud.
- Gerungan, W.A. 1987. *Psikologi Sosial*. Bandung: PT Eresco.
- Maleong, J.L. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kasiram, M. 1993. *Kapita Selekta Pendidikan III*. Malang: UMM Press.
- Muhaimin. 1991. *Konsep Pendidikan Islam, Sebuah Telaah Komponen Dasar Kurikulum*. Solo: Romadlon.
- Subiyanto. 1994. *Klasifikasi Strategi Pembelajaran dan Penggunaannya dalam Proses Belajar Mengajar Agama*. Risalah tidak diterbitkan. Malang: Tanpa Penerbit.
- Hadi, S. 1980. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Ketetapan MPR RI No II tahun 1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)*. Jakarta: BP-7 Pusat.
- Undang-Undang No 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Armas Duta Jaya.